

## Pengaruh Komitmen Organisasi, Pelaksanaan Anggaran Dan Implementasi Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Luky Trihandaru Hernanda<sup>1\*</sup>

<sup>1\*</sup>Departement of Economics, Faculty of Economics and Business, Universitas Mercu Buana Jakarta, Indonesia

### ARTICLE INFO

**Article history:**

Received 11-02-2020

Revised 03-07-2020

Accepted 03-07-2020

Available 21-07-2020

Revised (1) 15-07-2022

Revised (1) 18-07-2022

Accepted 19-07-2022

Revised Available 19-07-2022

**Kata Kunci:**

Komitmen Organisasi, Pelaksanaan Anggaran, Implementasi Sistem Informasi Akuntansi dan Kualitas Laporan Keuangan.

**Paper type:** Research paper

**Please cite this article:** Hernanda, L,K "Pengaruh Komitmen Organisasi, Pelaksanaan Anggaran dan Implementasi Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan " Al-Mal: Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam [ONLINE], Volume 01 Number 02 (Juli 21, 2020)

**Cite this document:**

Al-Mal 2th edition

**\*Corresponding author**

e-mail: [luky.trihandaru@gmail.com](mailto:luky.trihandaru@gmail.com)

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh komitmen organisasi, pelaksanaan anggaran dan implementasi sistem informasi akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode sensus terhadap 35 responden. Alat yang digunakan untuk menganalisa data dalam penelitian ini menggunakan SPSS 24. Hasil penelitian menunjukkan Komitmen Organisasi tidak berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan, sedangkan untuk Pelaksanaan Anggaran dan Implementasi Sistem Informasi Akuntansi sangat berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Keterbatasan penelitian ini yaitu hanya membahas seberapa besar pengaruh Pengaruh Komitmen Organisasi, Pelaksanaan Anggaran dan Implementasi Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan, sehingga membuka peluang untuk peneliti-peneliti yang baru dengan mengangkat tema yang sama dengan jumlah sampel objek penelitian yang lebih banyak atau menambahkan variabel-variabel yang lain yang akan mempengaruhi variabel kualitas laporan keuangan. Implikasi dari penelitian ini adalah untuk menghasilkan kualitas laporan keuangan yang bisa dimaksimalkan dari adanya komitmen organisasi, pelaksanaan anggaran yang efektif dan pengimplementasian system informasi akuntansi pada setiap masing-masing stakeholder. berkaitan bagaimana kondisi kinerja perusahaan saat itu serta risiko kredit khususnya pada perusahaan perbankan pada saat itu.

**ABSTRACT:** *This study aims to determine the effect of organizational commitment, budget execution and implementation of accounting information systems on the quality of financial reports. This research is a quantitative research using the census method of 35 respondents. The tool used to analyze the data in this study uses SPSS 24. The results show that Organizational Commitment has no effect on the Quality of Financial Reports, while Budget Execution and Accounting Information System Implementation has a significant effect on the Quality of Financial Reports. The limitation of this study is that it only discusses how big the influence of Organizational Commitment, Budget Implementation and Implementation of Accounting Information Systems on the Quality of Financial Reports, thus opening up opportunities for new researchers by raising the same theme with a larger number of samples of research objects or adding variables. -other variables that will affect the quality of financial statements. The implication of this research is to produce quality financial reports that can be maximized from organizational commitment, effective budget execution and implementation of accounting information systems for each stakeholder. related to how the condition of the company's performance at that time and credit risk, especially in banking companies at that time.*

**Keyword:** *Organizational Commitment, Budget Execution, Implementation of Accounting Information Systems and Quality of Financial Reports*

## PENDAHULUAN

Pemerintah Daerah harus dapat mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan daerah melalui Laporan Keuangan. Laporan Keuangan ini terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Sebagai bentuk dari pertanggungjawaban kinerja pemerintah daerah, Kepala Daerah mempunyai kewajiban untuk menyampaikan laporan keuangan kepada para *stakeholder*, antara lain DPRD dan masyarakat umum. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pada Pasal 31 ayat (1), mewajibkan Gubernur/ Bupati/ Walikota menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Berkaitan dengan kualitas laporan keuangan, fenomena atas buruknya pengelolaan laporan keuangan pada pemerintah daerah, kementerian dan Lembaga negara diungkapkan oleh Wakil ketua BPK RI (Bisri, 2014) bahwa Kementerian dan Lembaga yang masih menerima opini di bawah WTP bisa saja memperbaiki laporan dan penggunaan anggaran. Hal ini harus didukung dengan adanya komitmen, rencana yang jelas (*action plan*), mekanisme kontrol, dan pejabat yang ditugaskan fokus dalam perbaikan laporan keuangan.

Anggota V BPK RI (Djanegara, 2017) mengungkapkan BPK RI memberikan opini WDP atas laporan keuangan pemerintah DKI karena terdapat beberapa ketidakberesan dalam penggunaan anggaran. Kepala Perwakilan BPK RI Propinsi Jawa Barat (Cornell S. Prawiradiningrat, 2014), mengungkapkan bahwa dalam pemeriksaan oleh BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bogor tahun anggaran 2014, masih menemukan beberapa permasalahan yang cukup signifikan dan cenderung berulang, baik yang mempengaruhi penyajian maupun tidak mempengaruhi penyajian laporan keuangan.

Ketua BPK RI (Hadi Poernomo, 2011) menyatakan Sebanyak 326 pemda atau 91% dari 358 pemda yang laporan keuangannya diaudit oleh BPK RI mendapatkan predikat buruk, hanya 32 pemda yang memperoleh opini wajar tanpa pengecualian. Buruknya pengelolaan laporan keuangan pemda, paparnya, sebagian besar terjadi karena sistem pengendalian intern (SPI) yang belum berfungsi secara optimal. Kelemahan SPI terletak pada banyaknya kasus pencatatan keuangan yang tidak atau belum dilakukan, atau dilakukan tetapi tidak akurat. Perencanaan dan penganggaran tidak memadai dan pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan mekanisme APBD.

Berdasarkan beberapa fenomena diatas maka dilakukan penelitian ini dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh komitmen organisasi, pelaksanaan anggaran dan implementasi SIA terhadap kualitas pelaporan keuangan.

## 1.1. Komitmen Organisasi

Komitmen Organisasi (*Organizational Commitment*) didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana seorang karyawan memihak organisasi tertentu serta tujuan-tujuan dan keinginannya untuk mempertahankan keanggotaan dalam organisasi tersebut. (Sartika, 2014) memiliki kemauan untuk mengerahkan usaha yang kuat atas nama organisasi, dan keyakinan yang dalam penerimaan nilai dan tujuan organisasi. (Luthans, 2011)

(Kreitner & Kinicki, 2014) mengatakan secara pemahaman umum arti kata dari Komitmen adalah sebuah kesetujuan untuk melakukan sesuatu untuk diri sendiri, orang lain, kelompok atau organisasi. Sedangkan Komitmen Organisasi mencerminkan tingkatan dimana seseorang mengenali sebuah organisasi dan terikat pada tujuan-tujuannya.

(Kreitner & Kinicki, 2014) menyatakan bahwa komitmen organisasi terdiri atas tiga komponen terpisah yang saling berhubungan sebagai berikut:

- a) Komitmen Afektif, merupakan pelekatan emosi pegawai pada, identifikasi pegawai dengan, dan keterlibatan pegawai dalam Perusahaan.
- b) Komitmen Normatif, mencerminkan rasa tanggung jawab untuk terus bekerja.
- c) Komitmen berkelanjutan, merupakan kesadaran akan kerugian karena meninggalkan perusahaan.

Komitmen organisasi bisa menjadi salah satu faktor yang diduga dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan. Komitmen organisasional merupakan keinginan kuat sebagai anggota organisasi mengikuti arah, tujuan organisasi (Nugroho & Setyowati, 2019). Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa komitmen organisasional dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan.

Komitmen organisasi dibangun atas dasar kepercayaan pekerja atas nilai-nilai organisasi, kerelaan pekerja membantu mewujudkan tujuan organisasi dan loyalitas untuk tetap menjadi anggota organisasi. Jika pekerja merasa jiwanya terikat dengan nilai-nilai organisasional yang ada maka dia akan

merasa senang dalam bekerja, sehingga mempunyai tanggung jawab dan kesadaran dalam menjalankan organisasi dan termotivasi melaporkan semua aktivitas dengan melaksanakan akuntabilitas kepada publik secara sukarela termasuk akuntabilitas keuangannya melalui laporan keuangan. (Jaros, 2007) Pada konteks pemerintahan, aparat yang memiliki komitmen organisasi yang tinggi, akan menggunakan informasi yang dimiliki untuk menyusun laporan keuangan menjadi relatif lebih tepat. Selain itu, “komitmen organisasi dapat merupakan alat bantu psikologis dalam menjalankan organisasinya untuk pencapaian kinerja yang diharapkan”. (Nouri & Parker, 1996)

Komitmen organisasi bisa tumbuh disebabkan karena individu memiliki ikatan emosional terhadap organisasi yang meliputi dukungan moral dan menerima nilai yang ada serta tekad dari dalam diri untuk mengabdikan pada organisasi. Berdasarkan definisi komitmen terhadap organisasi, dapat dikatakan bahwa komitmen merefleksikan tiga dimensi utama, yaitu: 1) *Affective Commitment*; 2) *Normative Commitment*; dan 3) *Continuance Commitment*. (Meyer & Allen, 1997) Sedangkan (Mowday et al., 1979) mengelompokkan komitmen organisasi menjadi tiga yaitu: ideifikasi yaitu pemahaman atau penghayatan terhadap tujuan organisasi, keterlibatan yaitu perasaan terlibat dalam suatu pekerjaan atau perasaan bahwa pekerjaan tersebut adalah menyenangkan, loyalitas perasaan bahwa organisasi adalah tempatnya bekerja dan tinggal.

## 1.2. Pelaksanaan Anggaran

(Munandar, 2000) anggaran adalah suatu rencana yang disusun secara sistematis, meliputi seluruh kegiatan perusahaan, yang dinyatakan dalam satuan (Unit Moneter) dan berlaku untuk jangka waktu tertentu yang akan datang. (Tywoniak et al., 2009) mendefinisikan anggaran merupakan pernyataan etimasi kinerja yang hendak dicapai selama satu periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial yang dalam pelaksanaan kebijakan sebagai suatu proses mengambil keputusan kebijakan, yang biasanya dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan, perintah eksekutif atau dekrit presiden. (Hermawan, 2017)

Seluruh kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah disusun berdasarkan rencana kerja yang lengkap disertai dengan rencana keuangannya. Rencana keuangan yang disusun Pemerintah Daerah ini disebut anggaran daerah atau secara lengkap disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 (pasal 1 butir 8) Tentang Keuangan Negara, APBD merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Daerah (DPRD). Sedangkan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Pasal 1 butir 9) Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. proses atau metode untuk mempersiapkan suatu anggaran dengan tahap yang sangat rumit dan mengandung nuansa politik yang kental karena memerlukan pembahasan dan pengesahan dari wakil rakyat di parlemen yang terdiri dari berbagai utusan partai politik. (Sumenge, 2013)

(Suparmoko, 2016) mengatakan bahwa dalam pengelolaan anggaran diperlukan kemampuan yang berhubungan dengan usaha untuk mencapai tujuan anggaran dengan jalan menggunakan manusia dan berbagai sumber yang tersedia. Untuk mencapai standar kualitas yang ditetapkan maka anggaran harus dikelola dengan sebaik-baiknya yaitu dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan anggaran yang meliputi perencanaan anggaran, ratifikasi anggaran, pelaksanaan anggaran, serta pelaporan dan evaluasi. (Wimoro & Hamdi, 2021)

### 1.3. Implementasi Sistem Informasi Akuntansi

(N. Z. M. Sari et al., 2016) mengatakan Sistem Informasi Akuntansi merupakan suatu kumpulan dari berbagai macam sumber daya, seperti manusia dan juga peralatan yang dirancang untuk mengubah data keuangan dan juga data lainnya menjadi sebuah informasi yang berguna bagi user dan penggunaannya. Sedangkan menurut (Considine et al., 2012) sebagai berikut:

*“Accounting Information System as the application of technology to the capturing, verifying, storing, sorting and reporting of data relating to an organisation’s activities.”*

Menurut (Susanto, 2017), Sistem Informasi Akuntansi adalah:

“Kumpulan (integrasi) dari sub-sub sistem/ komponen baik fisik maupun non fisik yang saling berhubungan dan bekerjasama satu sama lain secara harmonis untuk mengolah data transaksi yang berkaitan dengan masalah keuangan menjadi informasi akuntansi.”

Pemanfaatan sistem informasi akan sangat membantu mempercepat proses pengolahan data transaksi dan penyajian laporan keuangan, serta dapat menghindari kesalahan dalam melakukan posting dari dokumen, jurnal, buku besar hingga menjadi suatu laporan keuangan, sehingga laporan keuangan tersebut tidak kehilangan nilai informasi laporan keuangan. (Salehi & Torabi, 2012) Hal ini pun senada dengan penelitian (S. P. Sari & Witono, 2014) bahwa penggunaan sistem informasi berpengaruh terhadap positif kualitas laporan keuangan.

#### 1.4. Kualitas Laporan Keuangan

Pelaporan keuangan adalah struktur dan proses yang menggambarkan bagaimana informasi keuangan disediakan dan dilaporkan untuk mencapai tujuan pelaporan keuangan yang padagilirannya akan membantu pencapaian tujuan ekonomik dan sosial negara. (Suwardjono, 2005)

(Wiley, 2015) menyebutkan bahwa ada tiga hal yang menunjukkan kualitas pelaporan keuangan yang tinggi yaitu:

1. Kelengkapan (*Completeness*), yaitu jumlah kewajiban di luar neraca yang signifikan (misalnya, sewa operasi dan kontrak pembelian *take-or-pay*) harus menjadi perhatian bagi seorang analis karena leverage yang akandilaporkan harus dapat dimengerti. Indikator yang digunakan dalam dimensi kelengkapan adalah kelengkapan informas
2. Pengukuran tidak bias (*Unbiased Measurement*) yaitu aspek penting dari kualitas pelaporan keuangan untuk aset dan kewajiban dengan valuasi



secara subjektif. Indikator yang digunakan dalam dimensi pengukuran tidak bias adalah bagian penting dari aset dan bagian penting dari kewajiban.

3. Presentasi yang jelas (*clear presentation*)

yaitu hal-hal yang telah diperinci perusahaan ketika menampilkan laporan keuangan Indikator yang digunakan dalam dimensi presentasi yang jelas adalah rincian yang diperlukan dan informasi yang ringkas dan membantu pemahaman pengguna.

Menurut (Suwanda, 2015), terdapat tujuan umum atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD), berikut ini adalah beberapa tujuan umum dari LKPD yaitu:

- a) Menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan suatu alokasi sumber daya.
- b) Mempunyai peranan prediktif dan prospektif serta menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan serta resiko ketidakpastian yang terkait.
- c) Menyajikan informasi bagi pengguna mengenai indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran.

Menurut Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar LKPD dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki:

- a) Relevan, apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengkoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu.



- b) Andal, informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi.
- c) Dapat dibandingkan, informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal.
- d) Dapat dipahami, informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna.

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Penelitian ini, penulis menggunakan penelitian kuantitatif dimana proses penggalian informasi diwujudkan dalam bentuk angka-angka sebagai alat untuk menemukan keterangan mengenai apa yang diketahui. Penelitian kuantitatif lebih menekankan fenomena-fenomena objektif, dan maksimalisasi objektivitas, desain penelitian ini dilakukan dengan menggunakan angka-angka, pengolahan statistik, struktur dan percobaan terkontrol. (Moleong, 2021)

Menurut data penelitian pada pendekatan kuantitatif berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik. Penelitian kuantitatif yang digunakan adalah kuantitatif kausal karena bertujuan untuk menguji hipotesis tentang pengaruh. Berdasarkan jenis investigasinya, penelitian ini termasuk dalam penelitian kausal karena penelitian ini ingin menemukan penyebab atau hubungan sebab akibat dari satu atau lebih masalah seperti yang telah dinyatakan dalam rumusan masalah. (Sekaran & Bougie, 2010)

Dalam penelitian ini, yang menjadi populasi adalah seluruh SKPD yang berada di Pemerintah Kota Bogor yang berjumlah 35 SKPD. Penelitian ini memiliki populasi yang tidak lebih besar dari 100 orang responden, maka penulis akan mengambil 100% jumlah populasi yang berasal di Pemerintah Daerah Kota Bogor yaitu sebesar 35 orang responden yang bersifat benar-benar mewakili (*representative*) dari setiap SKPD di Pemerintah Kota Bogor.

## HASIL DAN KESIMPULAN

### 1. Deskripsi Objek Penelitian

Profil umum responden yaitu pria 18 Responden (51%) sedangkan Perempuan 17 Responden (49%). Para responden memiliki usia mayoritas di atas 35 Tahun yaitu 33 Responden (94%), sedangkan tingkat pendidikan mayoritas lulusan S1, yaitu sebanyak 21 Responden (60%). Berdasarkan masa kerja, responden yang sudah bekerja <5 tahun sebanyak 3 Responden (9%), masa kerja 5 - 10 tahun sebanyak 4 Responden (11%). Masa kerja 11 - 20 tahun memiliki persentase paling besar yaitu 49% atau 17 responden, dan responden yang memiliki masa kerja >20 tahun memiliki persentase 31% atau 11 Responden. Melihat dari profil responden diatas, menunjukkan bahwa para responden sudah memiliki pengalaman yang cukup lama dalam memahami baik secara teknis maupun secara organisasi terkait dengan tata cara pengelolaan di masing-masing SKPD.

### 2. Analisis Deskriptif

#### 2.1. Deskripsi Variabel Komitmen Organisasi

Variabel komitmen organisasi ( $X_1$ ) dalam penelitian ini memiliki 3 dimensi penelitian sebagai berikut:

Tabel .1.

Nilai Rata-Rata dan Kategori Dimensi Penelitian  
Variabel Komitmen Organisasi

No	Dimensi	Mean
1	Komitmen Afektif	3,99
2	Komitmen Normatif	4,37
3	Komitmen <i>Continuance</i>	3,60
Nilai Rata-rata ( <i>Mean</i> )		3,98

Sumber : Data Primer diolah

Dari tabel 1 dapat dijelaskan bahwa 3 dimensi variabel komitmen organisasi memiliki nilai rata-rata sebesar 3,98. Hal ini menunjukkan bahwa

responden di setiap SKPD Pemerintah Daerah Kota Bogor telah memiliki komitmen organisasi yang baik.

## 2.2. Deskripsi Variabel Pelaksanaan Anggaran

Variabel pelaksanaan anggaran ( $X_2$ ) dalam penelitian ini memiliki 6 dimensi penelitian sebagai berikut:

Tabel .2.

Nilai Rata-Rata dan Kategori Dimensi Penelitian  
Variabel Pelaksanaan Anggaran

No	Dimensi	Mean
1	Fungsi Otorisasi	4,63
2	Fungsi Perencanaan	4,38
3	Fungsi Pengawasan	4,57
4	Fungsi Alokasi	4,30
5	Fungsi Distribusi	4,31
6	Fungsi Stabilitas	4,49
Nilai Rata-rata (Mean)		4,45

Sumber : Data Primer diolah

Dari tabel 2 dapat dijelaskan bahwa 6 dimensi variabel pelaksanaan anggaran memiliki nilai rata-rata sebesar 4,45. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan anggaran di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor telah berjalan dengan baik.

## 2.3. Deskripsi Variabel Sistem Informasi Akuntansi

Variabel pelaksanaan implementasi SIA ( $X_3$ ) dalam penelitian ini memiliki 6 dimensi penelitian sebagai berikut:

Tabel .3.

Nilai Rata-Rata dan Kategori Dimensi Penelitian  
Variabel Implementasi Sistem Informasi Akuntansi

No	Dimensi	Mean
1	Perangkat Keras	4,55

	( <i>Hardware</i> )	
2	Perangkat lunak ( <i>Software</i> )	4,48
3	<i>Brainware</i>	4,24
4	Prosedur	4,32
5	<i>Database</i>	4,38
6	Jaringan komputer dan telekomunikasi	4,30
Nilai Rata-rata ( <i>Mean</i> )		4,37

Sumber : Data Primer diolah

Berdasarkan tabel 3 dapat dijelaskan bahwa dari 6 dimensi variabel implementasi sistem informasi akuntansi memiliki nilai rata-rata sebesar 4,37. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi sistem informasi akuntansi di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor telah berjalan dengan baik.

#### 2.4. Deskripsi Variabel Kualitas Laporan Keuangan

Variabel kualitas laporan keuangan dalam penelitian ini memiliki 4 dimensi sebagai berikut:

Tabel .4.

Nilai Rata-Rata dan Kategori Dimensi Penelitian  
Variabel Kualitas Laporan Keuangan

No	Dimensi	<i>Mean</i>
1	Relevan	4,69
2	Andal	4,70
3	Dapat Dibandingkan	4,73
4	Dapat Dipahami	4,63
Nilai Rata-rata ( <i>Mean</i> )		4,69

Sumber : Data Primer diolah

Berdasarkan tabel 4 dapat dijelaskan bahwa dari 4 dimensi variabel kualitas laporan keuangan memiliki nilai rata-rata sebesar 4,69. Hal ini

menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kota Bogor telah menghasilkan kualitas laporan keuangan yang sangat baik.

#### 2.5. Pengaruh Komitmen Organisasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Berdasarkan hasil uji statistik yang telah dilakukan bahwa variabel komitmen organisasi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Berdasarkan analisa data atas jawaban kuesioner, dapat dilihat bahwa mayoritas para responden (kepala SKPD atau Kasubag) memiliki komitmen yang bersifat normatif yang berarti bahwa para responden yaitu ASN cenderung bekerja pada organisasi dengan alasan adanya kewajiban dan tanggung jawab untuk tetap berada di organisasi.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Setiyawati, 2013), namun hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Suarmika & Suputra, 2016), (Silviana, 2014), (Widari & Sutrisno, 2017), (Suwanda, 2015), (Ratifah & Ridwan, 2014), (Zuria, 2016) (Lodhrakentjana & Luthan, 2014) dan (Maksyur et al., 2015).

#### 2.6. Pengaruh Pelaksanaan Anggaran terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Berdasarkan hasil uji statistik yang telah dilakukan, bahwa variabel pelaksanaan anggaran berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini dapat terlihat dari IHPS II BPK RI tahun Anggaran 2015 dengan adanya beberapa temuan dari BPK RI terkait dengan lemahnya sistem pengendalian intern yaitu sebanyak 3 permasalahan atas penyimpangan terhadap peraturan tentang belanja. Sehingga atas beberapa temuan tersebut BPK RI memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian untuk LKPD Pemerintah Daerah Kota Bogor tahun anggaran 2015.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Fransiska et al., 2016), (Sardi et al., 2016), (Nurdiono et al., 2016), (Kawedar & Lubis, 2009) dan (Kewo, 2014).

#### 2.7. Pengaruh Implementasi Sistem Informasi Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Berdasarkan hasil uji statistik yang telah dilakukan bahwa variabel implementasi sistem informasi akuntansi berpengaruh signifikan terhadap

kualitas laporan keuangan. Pemerintah Kota Bogor telah memiliki sistem informasi akuntansi dalam mengolah data transaksi di seluruh lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor diantaranya adalah SIKD (Sistem Informasi Keuangan Daerah) dan SIMRAL (Sistem Informasi Manajemen Perencanaan, Anggaran dan Pelaporan). Sistem informasi ini di rancang dan dikembangkan dalam rangka upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik (*E-Government*), serta memudahkan dan mempercepat proses dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Kualitas dari informasi menjadi ukuran seberapa baik terpenuhi permintaan akan informasi tersebut. (Pareek, 2006) Informasi akuntansi berkualitas tinggi yaitu informasi akuntansi yang memiliki karakteristik yang membuat informasi tersebut lebih berguna. (O'Brien & Marakas, 2011) Sehingga dengan adanya implementasi SIA maka akan meningkatkan dan menghasilkan kualitas laporan keuangan yang baik.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Rachmawati & Fardinal, 2017), (Abdallah, 2013), (MayaSari, 2017), (Juwita, 2013), (Meiryani et al., 2019).

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan Hasil analisa output pengolahan data maka dapat disimpulkan bahwa Komitmen organisasi tidak berpengaruh pada kualitas laporan keuangan. Buruknya kualitas laporan keuangan khususnya pada Pemerintah Daerah tidak dipengaruhi oleh komitmen organisasi, walaupun para ASN memiliki komitmen organisasi yang baik namun hal ini tidak mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Komitmen organisasi yang terbentuk di lingkungan ASN adalah komitmen organisasi yang bersifat normatif yang berarti para ASN cenderung bekerja pada organisasi dengan alasan kewajiban dan tanggung jawab untuk tetap berada di organisasi. Sedangkan komitmen yang berkaitan dengan pemenuhan kewajiban atas penyajian laporan keuangan masih kurang dalam pemenuhannya. Sedangkan Pelaksanaan anggaran berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan

keuangan. Pelaksanaan anggaran khususnya di sebuah pemerintah daerah memiliki peran penting dalam menentukan kualitas laporan keuangan, karena hal ini terkait dengan pengelolaan dana masyarakat yang bertujuan untuk pembangunan sebuah daerah. Jika pelaksanaan anggaran berjalan dengan baik maka kualitas laporan keuangan juga semakin berkualitas. Sementara Implementasi SIA berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Implementasi sistem informasi akuntansi pada pemerintah daerah akan dapat memenuhi kebutuhan dalam penyusunan sebuah laporan keuangan secara efektif dan efisien. Dukungan sistem informasi akuntansi yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintah akan menghasilkan informasi yang baik sehingga kualitas laporan keuangan juga akan semakin berkualitas.

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan yang telah dijelaskan di atas, maka peneliti memberikan saran-saran sebagai berikut: 1). Saat ini para ASN sudah memiliki komitmen yang cukup baik dalam hal komitmen pelaksanaan tugas dan kewajibannya, namun pihak pemerintah daerah perlu membangun sikap komitmen organisasi kepada para ASN yang ditujukan pada pemenuhan kewajiban atas penyajian laporan keuangan. Sehingga jika terdapat temuan dari BPK RI dapat segera menjadi perhatian dan tanggung jawab bersama untuk perbaikannya. 2). Semua pelaksanaan anggaran di kota Bogor sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006, hal ini bisa dilihat dari pembangunan yang dilakukan di Kota Bogor sudah sangat bagus, ini menandakan bahwa pelaksanaan anggaran di Kota Bogor benar-benar digunakan untuk kesejahteraan masyarakatnya. Namun pelaksanaan anggaran ini perlu juga diimbangi dengan pengelolaan aset pemerintah yang baik, dengan pengelolaan aset yang baik dapat menjadi proses *monitoring* dan *evaluation* bagi pelaksanaan anggaran yang efektif dan efisien. 3). Dalam rangka menjalankan pemerintahan yang berbasis elektronik (*E-Government*), pemerintah daerah Kota Bogor harus lebih banyak memiliki SDM yang lebih



kompeten dalam hal penggunaan SIA. Peningkatan kompetensi SDM dapat dengan cara melakukan pelatihan-pelatihan terhadap para ASN, hal ini bertujuan agar penggunaan SIA dapat lebih efektif dan efisien dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

## **IMPLIKASI PENELITIAN**

Implikasi dari penelitian ini adalah untuk menghasilkan kualitas laporan keuangan yang bisa dimaksimalkan dari adanya komitmen organisasi, pelaksanaan anggaran yang efektif dan pengimplementasian system informasi akuntansi pada setiap masing-masing stakeholder. berkaitan bagaimana kondisi kinerja perusahaan saat itu serta risiko kredit khususnya pada perusahaan perbankan pada saat itu.

## **REFERENSI**

- Abdallah, A. A. J. (2013). The impact of using accounting information systems on the quality of financial statements submitted to the income and sales tax department in Jordan. *European Scientific Journal*, 1(4), 41–48.
- Bisri, H. (2014). *Ilmu Dakwah Pengembangan Masyarakat*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press.
- Considine, B., Parkes, A., Olesen, K., Blount, Y., & Speer, D. (2012). *Accounting information systems: understanding business processes*. John Wiley and Sons Australia, Ltd.
- Djanegara, M. S. (2017). Pengaruh kualitas audit terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Akuntansi*, 21(3), 461–483.
- Fransiska, N., Sarwono, A. E., & Astuti, D. S. P. (2016). *Sistem Pengendalian Intern dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*.
- Hermawan, Y. (2017). Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Anggaran Terhadap Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk Mewujudkan Kualitas Pertanggungjawaban Keuangan Kabupaten Garut. *Jurnal Pembangunan Dan Kebijakan Publik*, 4(1), 1–5.

- Jaros, S. (2007). Meyer and Allen model of organizational commitment: Measurement issues. *The Icfai Journal of Organizational Behavior*, 6(4), 7-25.
- Juwita, R. (2013). Pengaruh implementasi standar akuntansi pemerintahan dan sistem informasi akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan. *Trikonomika*, 12(2), 201-214.
- Kawedar, W., & Lubis, I. K. A. J. (2009). Analisis Komitmen Organisasional terhadap Keinginan Berpindah. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 10(1), 272-283.
- Kewo, C. L. (2014). The Effect of Participative Budgeting, Budget Goal Clarity and Internal Control Implementation on Managerial Performance. *Research Journal of Finance and Accounting*, 5(12), 81-87.
- Kreitner, R., & Kinicki, A. (2014). *Organizational behavioral*. Boston: McGraw-Hill.
- Lodhrakentjana, B., & Luthan, E. (2014). Motivasi, Kepuasan Kerja, Komitmen Pegawai Akuntansi dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Pemerintah Kota Depok. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 1(02), 187-199.
- Luthans, F. (2011). *Organizational Behavior: An Evidence-Based Approach*. McGraw-Hill/Irwin.
- Maksyur, N. V., Tanjung, A. R., & Hariyani, E. (2015). *Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Komitmen Organisasi, Sistem Pengendalian Intern, Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Empiris Pada SKPD Kabupaten Indragiri Hulu)*. Riau University.
- MayaSari, N. Z. (2017). The Influence of Implementation Intern Control, Information System Technology. [Http://Serialsjournals. Com/Articles. Php? Volumesno\\\_id= 1178\&journals\\\_id= 41\& 4](http://Serialsjournals.Com/Articles.Php?Volumesno\_id=1178&journals\_id=41&4), 125-131.
- Meiryani, M., Susanto, A., & Warganegara, D. L. (2019). The issues influencing of environmental accounting information systems: an empirical investigation of SMEs in Indonesia. *International Journal of Energy Economics and Policy*, 9(1), 282.
- Meyer, J. P., & Allen, N. J. (1997). *Commitment in the workplace: Theory, research,*

*and application*. Sage publications.

- Moleong, L. J. (2021). *Metodologi penelitian kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Mowday, R. T., Steers, R. M., & Porter, L. W. (1979). The measurement of organizational commitment. *Journal of Vocational Behavior*, 14(2), 224–247.
- Munandar, M. (2000). *Budgeting: Perencanaan Kerja, Pengkoordinasian Kerja, Pengawasan Kerja*.
- Nouri, H., & Parker, R. J. (1996). The effect of organizational commitment on the relation between budgetary participation and budgetary slack. *Behavioral Research in Accounting*, 8, 74–90.
- Nugroho, F. A., & Setyowati, W. (2019). Pengaruh Komitmen Organisasional, Sistem Informasi Akuntansi, Dan Peran Audit Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *ECONBANK: Journal of Economics and Banking*, 1(2), 125–134.
- Nurdiono, N., Sugiri, S., Halim, A., & Gudono, G. (2016). The Effect Of Budgets'proportion And Non-Financial Factors On The Audit Results Of Local Governments'financial Statements In Indonesia. *Journal Of Indonesian Economy And Business*, 31(2), 178–191.
- O'Brien, J. A., & Marakas, G. M. (2011). Developing business/IT solutions. *Management Information Systems*, 488489, 74–89.
- Pareek, D. (2006). *Business Intelligence for telecommunications*. Auerbach Publications.
- Rachmawati, S. D., & Fardinal, F. (2017). Pengaruh Aktivitas Pengendalian, Informasi dan Komunikasi terhadap Kualitas Sistem Informasi Akuntansi dan Dampaknya terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Kasus pada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia). *Profita: Komunikasi Ilmiah Dan Perpajakan*, 10(3), 426–437.
- Ratifah, I., & Ridwan, M. (2014). Komitmen organisasi memoderasi pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Trikonomika Journal*, 11(1), 29–39.
- Salehi, M., & Torabi, E. (2012). The Role Of Information Technology In

- Financial. *Business Excellence*, 6(1), 115.
- Sardi, S. J., Rifa'i, H. A., & Husnan, L. H. (2016). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Empiris Pada Satker Balai Besar Bmkg Wilayah Iii Denpasar-Bali). *InFestasi*, 12(2), 158-172.
- Sari, N. Z. M., Se, M., & Purwanegara, H. D. (2016). The effect of quality accounting information system in Indonesian government (BUMD at Bandung area). *Research Journal of Finance and Accounting*, 7(2).
- Sari, S. P., & Witono, B. (2014). Keterandalan dan ketepatanwaktuan pelaporan keuangan daerah ditinjau dari sumber daya manusia, pengendalian internal dan pemanfaatan teknologi informasi. *Call for Paper Research Methods and Organizational Studies*.
- Sartika, D. (2014). Pengaruh kepuasan kerja dan gaya kepemimpinan transformasional terhadap keinginan keluar karyawan dengan komitmen organisasi sebagai variabel mediasi (studi kasus di cv. Putra tama jaya). *Management Analysis Journal*, 3(2).
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2010). Research for Business—A Skill Building Approach. *John-Wiley and Sons, New York, NY*, 4, 401-415.
- Setiyawati, H. (2013). The effect of internal accountants' competence, managers' commitment to organizations and the implementation of the internal control system on the quality of financial reporting. *International Journal of Business and Management Invention*, 2(11), 19-27.
- Silviana, C. (2014). *Analisis Variabel-Variabel Yang Mempengaruhi Kebijakan Dividen (Studi pada Saham Indeks LQ-45 di BEI Periode 2010-2012)*. Brawijaya University.
- Suarmika, I. G. L., & Suputra, I. (2016). Kemampuan Komitmen Organisasi Dan Sistem Pengendalian Intern Memoderasi Pengaruh Kapasitas SDM Dan Penerapan SIKD Pada Kualitas LKPD Kabupaten Karangasem. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 5(2016), 2921-2950.
- Sumenge, A. S. (2013). Analisis Efektifitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran

- Belanja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Minahasa Selatan. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 1(3).
- Suparmoko, M. (2016). *Keuangan Negara Dalam Teori dan Praktik Edisi Keenam*. BPFE UGM.
- Susanto, A. (2017). *Sistem Informasi Akuntansi dan Sistem Informasi Manajemen*. Universitas Padjajaran, Lingga Jaya, Bandung.
- Suwanda, D. (2015). Factors affecting quality of local government financial statements to get unqualified opinion (WTP) of audit board of the Republic of Indonesia (BPK). *Research Journal of Finance and Accounting*, 6(4), 139–157.
- Suwardjono, T. A. (2005). *Perekayasaan Pelaporan Keuangan*. Yogyakarta: BPFE.
- Tywoniak, S., Rosqvist, T., Mardiasmo, D., & Kivits, R. (2009). Towards an integrated perspective on fleet asset management: engineering and governance considerations. *Proceedings of the 3rd World Congress on Engineering Asset Management and Intelligent Maintenance Systems*, 1553–1567.
- Widari, L., & Sutrisno, S. (2017). Pengaruh sistem pengendalian internal pemerintah dan komitmen organisasi terhadap kualitas laporan Keuangan daerah. *Jurnal Ilmiah Ilmu Ekonomi (Jurnal Akuntansi, Pajak Dan Manajemen)*, 5(10), 117–126.
- Wimoro, Y., & Hamdi, M. (2021). Penganggaran Kelurahan Sebagai Perangkat Kecamatan Di Kelurahan Bungo Barat Kecamatan Passar Muara Bungo Kabupaten Bungo Provinsi Jambi. *Jisipol | Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 5(2).
- Zuria, F. (2016). *Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Penerapan Standar*. Medan : Univeristas Sumatera Utara.